

**ANALISIS PENGORGANISASIAN DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA MELALUI KELURAHAN SIAGA BENCANA DI
KELURAHAN JOMBLANG, KECAMATAN CANDISARI, KOTA
SEMARANG**

Oleh : Rosa Pevitanada, Dyah Hariani

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The territory of Indonesia is a ring of fire area and is in the meeting of three tectonic plates potentially against the threat of natural disasters. Semarang city is a city with high disaster risk class. Given that the community is the biggest victims and first in facing disaster, the government has developed a community-based disaster risk reduction program. Community-based disaster risk reduction efforts in Semarang implemented through the establishment of Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Jomblang is one of the KSB in Semarang City with the highest incidence of disaster events in 2016. In KSB Jomblang needed active participation from the community. This study aims to describe the implementation of organizing in disaster management in KSB Jomblang as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of organizing. This research uses qualitative method with descriptive analysis model. The results of this study indicate that in the implementation of organizing KSB Jomblang when viewed from the process of organizing; the details of work, division of labor, grouping work, coordination of work, monitoring and reorganization has not been implemented optimally. Supporting factors in organizing KSB Jomblang are the high of social and tolerance, a division of labor according to skill, disaster administration has been running, and support from various parties. While the inhibiting factors are the differences of perception about the objectives, limited resources, the unclear division of work, lack of coordination, and the apathy of *Karang Taruna*. Suggestions that can be given include KSB Jomblang need to restructure and reorganize within their internal.

Keywords: Disaster Management, *Keluarga Siaga Bencana*, Restructuring, Reorganization

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sehingga menepatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Potensi Indonesia yang rawan bencana membutuhkan upaya penanggulangan bencana yang terintegrasi dan menyeluruh. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kota Semarang termasuk dalam kategori sering / tinggi dalam tingkat kejadian bencana. Sehingga Pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Dalam tahun 2016, total kejadian bencana berjumlah 152 kejadian bencana.

Mengingat korban terbesar dari bencana adalah masyarakat dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Di Kota Semarang kita kenal dengan Kelurahan Siaga Bencana. Kelurahan Siaga Bencana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kota Semarang tersebar di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan di Kota Semarang. KSB dibentuk pada kelurahan – kelurahan yang paling sering terjadi bencana.

Tabel 1.3
Jumlah Kejadian Bencana 2016

No	Kelurahan	Jumlah Kejadian
1	Kelurahan Jomblang	7
2	Kelurahan Sukorejo	7
3	Kelurahan Bugangan	5
4	Kelurahan Tandang	5
5	Kelurahan Candi	4
6	Kelurahan Kalipancur	4
7	Kelurahan Tegalsari	4
8	Kelurahan Mlatibaru	3
9	Kelurahan Karang Rejo	3
10	Kelurahan Kedung Mundu	3

Sumber:Data BPBD Kota Semarang Tahun 2016

Sebagai salah satu Kelurahan yang telah berstatus sebagai Kelurahan Siaga Bencana (KSB), Kelurahan Jomblang memiliki kejadian bencana terbanyak yaitu 7 kejadian. Melihat tingginya angka bencana yang terjadi di Kelurahan Jomblang, maka diperlukan suatu usaha untuk menanggulangi bencana tersebut. Meskipun bencana tidak mungkin dapat kita hilangkan, tetapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir resiko / dampak dari kejadian bencana tersebut. Dalam meminimalisir dampak dari bencana melalui pengorganisasian manajemen penanggulangan bencana yang baik.

Permasalahan yang terjadi di dalam KSB Jomblang sebagian besar terkait dengan pengorganisasian. KSB Jomblang dibentuk pada tahun 2013 namun sampai dengan sekarang keanggotaan KSB tidak bertambah, malah cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan minimnya sumberdaya manusia yang ada di dalam KSB Jomblang sehingga menyebabkan kegiatan penanggulangan bencana di KSB Jomblang tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu reorganisasi di dalam KSB Jomblang juga tidak berjalan. Sehingga keberlangsungan KSB ini sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan masalah – masalah tersebut maka perlu adanya peninjauan kembali tentang bagaimana pengorganisasian dalam manajemen penanggulangan bencana di KSB Kelurahan Jomblang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengorganisasian dalam penanggulangan bencana melalui Kelurahan Siaga Bencana di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ?

2. Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat pengorganisasian dalam penanggulangan bencana melalui Kelurahan Siaga Bencana di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengorganisasian dalam penanggulangan bencana melalui Kelurahan Siaga Bencana di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat pengorganisasian dalam penanggulangan bencana melalui Kelurahan Siaga Bencana di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ?

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Manajemen Publik

Menurut Overman dalam Keban (2004: 85), manajemen publik bukanlah “scientific manajemen”. Manajemen publik merefleksikan tekanan

tekanan antara orientasi “rational-instrumental” pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Keban (2004: 85) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang saling tumpang tindih.

2. Fungsi – Fungsi Manajemen

George R Terry menjelaskan terdapat empat fungsi manajemen yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut.

2) Pengorganisasian

(*Organizing*)

Pengorganisasian

merupakan proses

pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya.

3. Pengorganisasian

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses

penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam – macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang – orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat – alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas – aktivitas tersebut.

4. Langkah – Langkah Proses Pengorganisasian

Ernest Dale menguraikan proses pengorganisasian sebagai suatu proses multilangkah dan terpadu, dan menggariskan langkah – langkah berikut (dalam Herujito 2004:126) :

1. Perincian pekerjaan : merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pertama – tama terlebih dahulu harus ditetapkan tugas organisasi secara keseluruhan.

2. Pembagian pekerjaan : pembagian kerja ke dalam aktivitas – aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
3. Departementalisasi : mengelompokkan aktivitas – aktivitas yang sama secara logis menjadi departemen – departemen dan menyusun skema kerja antar departemen.
4. Koordinasi pekerjaan : menetapkan mekanisme (aturan main) untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis.
5. Monitoring dan reorganisasi : membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah – langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah – Langkah

Pengorganisasian di KSB

Jomblang

1. Perincian Pekerjaan

a. Tujuan Organisasi

Terdapat perbedaan persepsi mengenai tujuan dari pembentukan KSB antara pihak BPBD dengan pihak KSB Jomblang. Tujuan organisasi harus tersebut dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Namun dalam tujuan pembentukan KSB Jomblang masih sebatas dilaksanakan, dan belum dapat dipahami dan dihayati oleh anggota KSB. Seluruh anggota KSB mengetahui tujuan yang ingin dicapai, tetapi tidak dengan pemahaman dan penghayatan.

b. Tugas Pokok Organisasi

Penyusunan tugas pokok KSB Jomblang disesuaikan dengan tahapan manajemen penanggulangan bencana yang dimulai dari kegiatan

pra bencana, saat tanggun
darurat, dan pasca bencana.

c. Sumber Daya

Sumber daya manusia (*Men*) yang dimiliki KSB Jomblang masih sangat terbatas, namun disisi lain terdapat dukungan aktif dari pihak kelurahan Jomblang. Kedua, sumber daya uang (*Money*) yang digunakan untuk seluruh kegiatan juga masih minim bahkan tidak ada pendanaan sama sekali, sehingga menjadi penghambat dalam kegiatan operasional KSB yang hanya mengandalkan pendanaan pribadi. Ketiga, sumber daya sarana dan prasana (*Machine*) yang dimiliki KSB Jomblang sangat terbatas karena mereka tidak memiliki peralatan utama dalam upaya penanggulangan bencana longsor.

2. Pembagian Pekerjaan

a. Daftar Pokok Kegiatan

Penyusunan daftar pokok kegiatan di dalam kelurahan Jomblang sudah disesuaikan

dengan manajemen penanggulangan bencana, meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, serta pasca bencana.

b. Pembagian Tugas Anggota

Pembagian tugas anggota di KSB Jomblang dilakukan dengan cara keahlian khusus pribadi, yaitu pembagian tugas anggota yang dilaksanakan berdasarkan keahlian dari masing – masing anggota KSB Jomblang. Sementara untuk tumpang tindih pembagian tugas anggota di KSB Jomblang selama ini belum pernah terjadi.

c. Peran Perempuan

Perempuan dinilai sebagai pihak yang rentan sehingga perlu dilindungi dalam keadaan bencana. Dalam KSB Jomblang sudah terdapat peran dari perempuan yang berjumlah sekitar 5 orang, meskipun dalam pembagian pekerjaannya masih berspektifkan gender. 5

anggota perempuan di KSB Jomblang ditempatkan pada bagian sekretaris, bendahara, dan dapur umum.

3. Departementalisasi

a. Pengelompokan Kegiatan

Dalam pelaksanaan pembagian pekerjaan dalam KSB Jomblang terlihat ketidakjelasan dasar departementalisasi yang digunakan. Jika dilihat dari departementalisasi yang ada di KSB Jomblang yang terdiri dari seksi komunikasi, seksi evakuasi, seksi kesehatan, dan seksi dapur umum dan logistik terlihat lebih mengarah ke departementalisasi fungsi. Namun disini tidak semua fungsi dalam KSB Jomblang termasuk di dalam pengelompokan tersebut. Ada fungsi dari KSB Jomblang yaitu dalam pencegahan serta mengurangi resiko bencana dan juga fungsi penyaluran bencana dan rehabilitasi rekonstruksi yang tidak

terdapat di dalam pengelompokan pekerjaan yang ada di KSB Jomblang. Sehingga perlu kiranya diadakan perbaikan dalam pengelompokan pekerjaan dalam KSB Jomblang.

b. Pola Kerjasama

Pola kerjasama yang dilakukan oleh KSB jomblang kurang begitu terlihat jelas, pihak KSB Jomblang beranggapan yang penting ketika terjadi bencana dapat segera tertangani. Ketika terjadi bencana semua anggota KSB Jomblang turun ke lapangan, ada yang mengurus dapur umum, ada yang bertanggungjawab menginfokan ke BPBD dan sisanya ikut dalam evakuasi bencana. Namun dalam kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana pola kerjasamanya tidak terlihat dan hanya beberapa orang saja yang bekerja.

4. Koordinasi Pekerjaan

a. Koordinasi Internal

Koordinasi internal di KSB Jomblang berjalan tidak maksimal. Hal tersebut disebabkan karena seluruh koordinasi yang ada di KSB Jomblang hanya dilaksanakan melalui grup WA. Selain itu juga tidak ada rapat rutin yang mempertemukan seluruh anggota KSB Jomblang. Sehingga dapat dipastikan bahwa koordinasi yang ada di KSB Jomblang tidak maksimal karena tidak semua anggota mengetahui informasi – informasi yang disampaikan.

b. Koordinasi Eksternal

Koordinasi eksternal di KSB Jomblang sudah berjalan dengan baik. Adanya koordinasi antara pihak KSB Jomblang dengan pihak – pihak eksternal seperti BPBD Kota Semarang yaitu komunikasi dengan berbagai media baik dengan REG dan HT dan grup WA. Selain itu juga terdapat rapat – rapat yang diadakan oleh BPBD

Kota Semarang sehingga terjalin komunikasi secara langsung. Pihak eksternal lainnya yaitu relawan bencana Kota Semarang. Koordinasi dengan relawan berjalan dengan baik karena adanya grup WA yang selalu siap siaga setiap terjadi bencana.

5. Monitoring dan Reorganisasi

a. Monitoring

Kegiatan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan KSB Jomblang yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Jomblang dan juga pihak BPBD Kota Semarang. Monitoring yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Jomblang dilakukan melalui tiga cara, yaitu : Mengawasi langsung ditempat dalam hal ini pihak kelurahan ikut dalam keanggotaan KSB Jomblang dan aktif dalam pelaksanaan kegiatannya. Melalui laporan lisan juga disampaikan kepada Lurah Jomblang setiap kali ada kejadian bencana. Melalui

tulisan yang bentuknya sebagai arsip rangkuman kejadian bencana. Sementara untuk pengawasan yang dilakukan pihak BPBD Kota Semarang hanya dilakukan melalui tulisan. Berupa pengiriman laporan setiap terjadi bencana serta laporan tulisan melalui laporan di grup WA.

b. Reorganisasi

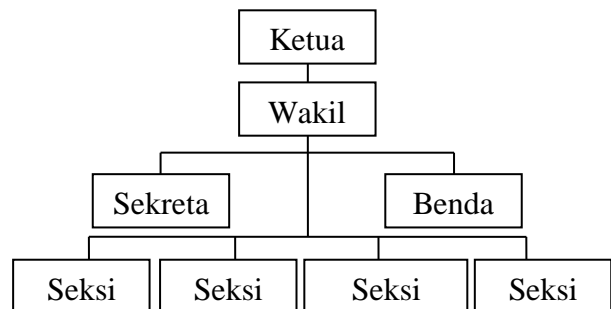
Reorganisasi di dalam KSB Jomblang tidak berjalan dengan baik, mengingat karang taruna Jomblang yang diharapkan menjadi generasi penerus KSB Jomblang ternyata tidak memberikan partisipasinya dalam KSB Jomblang. Struktur organisasi yang ada di KSB Jomblang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seksi komunikasi, seksi evakuasi, seksi kesehatan, dan seksi dapur umum dan logistik. Struktur organisasi itu dibuat oleh BPBD Kota Semarang dan KSB Jomblang tinggal

mengisinya. Struktur tersebut sudah dijalankan selama 5 tahun dan belum dilakukan reorganisasi. Padahal idealnya melakukan reorganisasi adalah 3 tahun. Dalam struktur organisasi Jomblang tidak begitu jelas dasar apa yang digunakan untuk pembagian departemen. Sehingga perlu dilakukan restrukturisasi dalam KSB Jomblang. Restrukturisasi adalah perubahan struktur suatu organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Restrukturisasi KSB Jomblang akan dirubah dengan dasar pembagian departemen berdasarkan fungsinya. Fungsi utama dari KSB Jomblang adalah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana baik dalam tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Fungsi dalam pra bencana adalah melakukan pencegahan bencana dan mengurangi

resiko bencana. Fungsi saat bencana adalah secepat mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Sementara fungsi dalam pasca bencana adalah melakukan kerja bakti untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana bersama dengan relawan, serta membantu penyaluran bencana dari BPBD kepada pihak korban yang terkena bencana. Namun yang ada di dalam struktur organisasi Jomblang tidak demikian. Departementalisasi yang ada di struktur organisasi KSB Jomblang seolah – olah hanya ketika kejadian bencana berlangsung, tidak ada fungsi untuk kegiatan pra bencana dan pasca bencana. sehingga disini perlu dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi KSB Jomblang.

Restrukturisasi Organisasi KSB

Jomblang



Struktur organisasi tersebut disesuaikan dengan pembagian departemen berdasarkan fungsinya, mengingat fungsi dari KSB Jomblang adalah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana baik dalam tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Seksi kesiagaan dan Mitigasi melaksanakan fungsi saat pra bencana, seksi evakuasi dan seksi dapur umum dan logistik melaksanakan fungsi saat terjadi bencana. Seksi Humas melaksanakan fungsi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. sehingga dengan perubahan struktur organisasi yang demikian, diharapkan pihak KSB Jomblang dapat menjalankan kegiatan manajemen bencana sesuai dengan fungsinya.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. Rasa sosial dan jiwa tolong menolong yang tinggi
Terbentuknya KSB Jomblang diawali dengan bergabungnya para personil yang didasari atas rasa sosial dan jiwa tolong menolong yang tinggi. Mereka dengan sukarela bergabung menjadi anggota KSB Jomblang.
- b. Pembagian tugas pokok anggota sesuai keahlian
Dalam pembagian tugas pokok anggota yang ada di dalam KSB Jomblang sudah disesuaikan dengan kemampuan masing – masing anggota.
- c. Administrasi kebencanaan sudah berjalan
Administrasi kebencanaan sudah berjalan dengan baik, adanya laporan setiap kejadian bencana. Laporan tersebut rutin dibuat, dan tersampaikan dengan baik. Berjalannya administrasi

tersebut juga memudahkan atau mempercepat segala bentuk penyaluran bantuan setiap kejadian bencana.

- d. Adanya dukungan dari berbagai pihak
Keberadaan KSB Jomblang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari masyarakat Jomblang sendiri, pihak kelurahan Jomblang, dan juga para relawan bencana.
- e. Pihak kelurahan jomblang aktif berpartisipasi
Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di KSB Jomblang, terdapat partisipasi aktif dari pihak kelurahan Jomblang, hal itu dibuktikan dengan pihak kelurahan memaksukkan 3 pegawai kelurahan untuk menjadi anggota dari KSB Jomblang.

2. Faktor Penghambat

- a. Perbedaan persepsi mengenai tujuan
Adanya perbedaan persepsi mengenai tujuan dari

- pembentukan KSB antara pihak BPBD dengan pihak KSB Jomblang. selain itu tidak semua anggota KSB Jomblang memahami dan menghayati tujuan yang ingin mereka capai.
- b. **Terbatasnya Sumber Daya yang ada di KSB**
Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia, sarana dan prasana dan juga sumber daya uang (pendanaan). Personil KSB Jomblang sedikit sekali yang aktif. Sarana dan prasarana yang ada di KSB Jomblang sangat terbatas. Selain itu, keseluruhan pendanaan untuk kegiatan operasional ditanggung sendiri oleh anggota KSB Jomblang.
 - c. **Ketidakjelasan pembagian pekerjaan yang ada**
Dalam pelaksanaan pembagian pekerjaan dalam KSB Jomblang terlihat ketidakjelasan dasar departementalisasi yang digunakan.
 - d. **Rendahnya Kesadaran Masyarakat**
Meskipun sebagian besar masyarakat Kelurahan Jomblang mendukung adanya KSB Jomblang beserta kegiatannya, namun masih ada saja masyarakat yang belum sadar bahwa bencana itu perlu ditangani dan dicegah.
 - e. **Sikap Apatis Karang Taruna**
Sikap apatis dari karang taruna ditunjukkan dengan tidak adanya partisipasi karang taruna dalam kegiatan KSB Jomblang sehingga reorganisasi di dalam KSB Jomblang tidak berjalan dengan baik. Sudah hampir 5 tahun anggota KSB Jomblang tidak bertambah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Langkah – Langkah Pengorganisasian di Kelurahan Siaga Bencana Jomblang**
 - a. Perincian Pekerjaan

Perincian pekerjaan di dalam KSB Jomblang belum berjalan dengan baik. Terdapat perbedaan pemahaman tentang tujuan dari pembentukan KSB Jomblang. Selain itu permasalahan sumber daya yang ada di KSB Jomblang juga terbatas.

b. Pembagian Pekerjaan

Pembagian pekerjaan di KSB Jomblang telah dilaksanakan dengan baik. Penyusunan daftar pokok kegiatan di KSB Jomblang yang disesuaikan dengan kegiatan dalam manajemen penanggulangan bencana. Selain itu pembagian tugas di KSB Jomblang juga dilaksanakan berdasarkan keahlian masing – masing anggota, serta sudah ada peran perempuan.

c. Departementalisasi

Departementalisasi di dalam KSB Jomblang sudah dilakukan, tetapi terdapat ketidakjelasan dalam dasar departementalisasi yang

digunakan. Selain itu, pola kerjasama yang dilakukan oleh KSB Jomblang belum begitu terlihat.

d. Koordinasi Pekerjaan

Koordinasi Pekerjaan di KSB Jomblang dilakukan melalui koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Seluruh koordinasi internal KSB Jomblang dilakukan melalui grup whatsapp. Sementara untuk koordinasi eksternal, melalui media komunikasi berupa REG, HT dan grup whatsapp.

e. Monitoring dan Reorganisasi

Monitoring dan reorganisasi yang dilakukan di KSB Jomblang belum berjalan dengan baik. Monitoring dilakukan oleh pihak Kelurahan Jomblang dan pihak BPBD Kota Semarang. Reorganisasi di KSB Jomblang tidak berjalan, dikarenakan tidak ada partisipasi dari karang taruna. Sehingga itu juga

diperlukan restrukturisasi di dalam KSB Jomblang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengorganisasian di Kelurahan Siaga Bencana Jomblang

a. Faktor Pendukung

- i. Rasa sosial dan jiwa tolong menolong yang tinggi, mereka dengan sukarela bergabung menjadi anggota KSB Jomblang.
- ii. Pembagian tugas pokok anggota yang ada di dalam KSB Jomblang sudah disesuaikan dengan kemampuan masing – masing anggota.
- iii. Administrasi kebencanaan sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya laporan setiap kejadian bencana.
- iv. Keberadaan KSB Jomblang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari masyarakat Jomblang sendiri, pihak kelurahan Jomblang, dan juga para relawan bencana.

v. Pihak kelurahan jomblang aktif berpartisipasi, hal itu dibuktikan dengan pihak kelurahan memaksukkan 3 pegawai kelurahan untuk menjadi anggota dari KSB Jomblang.

b. Faktor Penghambat

- i. Adanya perbedaan persepsi mengenai tujuan dari pembentukan KSB antara pihak BPBD dengan pihak KSB Jomblang. selain itu tidak semua anggota KSB Jomblang memahami dan menghayati tujuan yang ingin mereka capai.
- ii. Terbatasnya sumber daya yang ada di KSB Jomblang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pendanaan.
- iii. Pelaksanaan pembagian pekerjaan dalam KSB Jomblang terlihat ketidakjelasan dasar departementalisasi yang digunakan.
- iv. Rendahnya kesadaran masyarakat, masih ada saja masyarakat yang belum sadar

bahwa bencana itu perlu ditangani dan dicegah.

- v. Sikap apatis karang taruna, sehingga reorganisasi di dalam KSB Jomblang tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Perlu diadakannya kesepakatan pemahaman tentang tujuan dari KSB Jomblang itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam KSB Jomblang dapat dilakukan dengan lebih maksimal.
2. KSB Jomblang perlu menggunakan sistem uang kas untuk kegiatan pendaan mereka, pembayaran uang kas mungkin bisa sebulan sekali. Sehingga hal tersebut akan memudahkan pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada di KSB Jomblang. Termasuk untuk meningkatkan sarana dan prasarana.
3. Perlu diadakan pembagian pekerjaan yang jelas di dalam pengelompokan pekerjaan dalam KSB Jomblang.
4. KSB Jomblang diharapkan dengan sabar tetap memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat utamanya daerah atas dan juga kepada karang taruna yang diharapkan sebagai penerus KSB Jomblang.
5. KSB Jomblang perlu mengadakan rapat rutin setiap sebulan sekali untuk fungsinya untuk berkoordinasi kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan. Karena koordinasi melalui WA saja belum cukup efektif.
6. KSB Jomblang perlu segera melakukan reorganisasi, mengingat anggota yang aktif hanya beberapa orang saja. Dan tetap dengan sabar mencoba menggandeng karang taruna karena merekalah satu satunya harapan untuk melakukan reorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Athoillah, Anton. (2013). *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.
- Handoko, Hani. (2009), *Manajemen*. Yogyakarta : BPF - Universitas Gadjah Mada
- Hariani, Dyah. (2013). *Azas – Azas Manajemen*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2014). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. (2004). *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta : Gramedia.
- Ivancevich, John DKK. (2007). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, DKK. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Ramli, Soehatman. (2011). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukidin dan Damai Darmadi. (2009). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. (2010). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wiludjeng, Sri.(2007).*Pengantar Manajemen*.Yogyakarta:Graha Ilmu.

Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pediman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana

Jurnal

- Gunawan. Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat: (Kasus Kampung Siaga Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana Alam Di Kota Padang Sumatera Barat dan Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta). *Jurnal*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Sosial, Kementerian Sosial.
- Irawan, David. Peran Kelurahan Siaga Bencana Guna Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Jurnal*. Universitas Diponegoro.
- Kusumaratih, Arnidha. 2015. Manajemen Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nisa, Farichatun. 2014. Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. *Jurnal*. Universitas Airlangga.
- Saptadi, Gatot dan Hariyadi Djamal. 2012. Kajian Model Desa Tangguh Bencana Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bersama Bpbd D.I Yogyakarta. *Jurnal*. BNPB.
- Weeks, Michael R. 2007. *Organizing For Disaster: Lessons From The Military. Jurnal. United States Air Force Academy.*
- Mondal, Debabrata. 2015. *Role of Non Governmental Organization in Disaster Management. Jurnal. Visva Bharati University.*
- Larry G. Morton II DKK. 2015. *Women Of The River: Grassroots Organizing And Natural Disaster. Jurnal. Western New Mexico Universit*

Internet

- Website BPBD Kota Semarang. Dalam <http://bpbd.semarangkota.go.id/>. Diakses pada 28 Maret 2017.
- Website BPBD Provinsi Jawa Tengah. Dalam <https://bpbdjateng.info/>. Diakses pada 27 Maret 2017.
- Website BNPB Indonesia. Dalam <https://www.bnpb.go.id/>. Diakses pada 27 Maret 2017.
- Data dan Informasi Bencana Indonesia. Dalam <http://dibi.bnpb.go.id/>. Diakses pada 25 Maret 2017.